

KEPUTUSAN KEPALA DESA GELANG
NOMOR 411.6/13.a/DSGLG/2024

TENTANG
DAFTAR PEKERJA PROGRAM PADAT KARYA TUNAI
DI DESA GELANG KECAMATAN RAKIT KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH DESA GELANG
KECAMATAN RAKIT
KABUPATEN BANJARNEGARA**
JLN RAYA PU NO 1 NO HP 085227041277 KODE POS 53463



KEPUTUSAN KEPALA DESA GELANG

NOMOR: 411.6/13.a/Dsglg/2024

TENTANG

DAFTAR PEKERJA PROGRAM PADAT KARYA TUNAI 2024

DESA GELANG KECAMATAN RAKIT

KEPALA DESA GELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di desa, diperlukan pendaftaran calon pekerja dalam proses pelaksanaannya ;
 - b. bahwa keberadaan calon menjadi penting guna menjamin pemanfaatan kegiatan Padat Karya Tunai tepat sasaran, yakni penduduk miskin dan kurang mampu di desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan keputusan kepala Desa tentang tenaga kerja Padat Karya Tunai di desa

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian bantuan Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 78);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 33);

26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 50);
27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 18);
31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38);
32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
33. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76);
34. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2018 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 77);
35. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2018 Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 78);

36. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2020 Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 78);
37. Peraturan Desa Gelang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Gelang Tahun 2020 Nomor 02);
38. Peraturan Desa Gelang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gelang Tahun 2024 (Lembaran Desa Gelang Tahun 2023 Nomor 3);
39. Peraturan Desa Gelang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gelang Tahun 2023 Nomor 4);
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
41. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 412/8 Tahun 2024 Tentang Lokasi Dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Tahap I Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Pedesaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, No: 140-8698 Tahun 2017, NO: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, No: 01/SKB/MPPN/12/2017, Tentang Penyelarasan Kenguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa
 2. Tahapan dan proses perencanaan Padat Karya Tuna di Desa Gelang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.
 3. Aspirasi dan usulan calon pekerja kegiatan Padat Karya Tunai di desa, sesuai Petunjuk Teknis dan data dukung yang ada

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pekerja Program Padat Karya Tunai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini:

Tugas Pekerja Padat Karya Tuna adalah sebagai berikut :

1. membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan di tahun anggaran 2024;
2. melakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai spesifikasi teknis dan arahan pemerintah desa ;
3. Menandatangani daftar hadir dan tanda terima pembayaran HOK sesuai format yang telah disediakan ;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya surat keputusan ini akan dibebankan pembiayaanya pada APBDesa;

KETIGA : Masa berlakunya Surat Keputusan ini yang akan berakhir pada saat berakhirnya kegiatan pembangunan di desa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gelang

Pada tanggal : 25 Januari 2024

KEPALA DESA GELANG



Lampiran1 : Surat Keputusan Kepala Desa
Gelang

Nomor : 411.6/13.a/Dsglg/2024

Tentang : Daftar Pekerja Program Padat Karya
Tunai Tahun 2024 di Desa Gelang

**DATA PEKERJA PADA KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama Calon Pekerja	Status (Mandor/ Tukang/ Pekerja)	Jenis Kelamin			Keterangan		
			LK	PR	RTM	Pengang guran	Setengah pengang guran	Keluarga dengan Balita Gizi Buruk
1	SURADI	Mandor	√		√			
2	AGUS SALIM	PK	√			√		
3	AHMAD SUPRIYONO	PK	√		√			
4	NURAJIS AFANDI	PK	√		√			
5	AHMAD MUHSININ	PK	√		√			
6	MIARTO	PK	√		√			
7	RUSDI HADI	PK	√		√			
8	TRIO SURATNO	PK	√		√			
9	SOBIRUN	PK	√		√			
10	JAENAL ABIDIN	PK	√		√			
11	NURJIYANTO	PK	√		√			
12	M. SULASI HAYIN	PK	√		√			
13	YOHANES CANDRA	PK	√			√		
14	ACHMAD HARYADI	PK	√			√		

15	ALINGUDIN	PK	√		√		
16	RUSNO WIHADI	PK	√		√		
17	ALFIN ALFIAN	PK	√		√		
18	TEGUH PURWANTO	PK	√		√		
19	SUROTO	PK	√		√		
20	SUGIARTO	TK	√		√		
21	NAPSUDIN	TK	√		√		
22	MUKSIN	TK	√		√		
23	SUWARJO AL SUHAD	TK	√		√		
24	NURUDIN WASIMUN	TK	√		√		
25	SUWARSO	TK	√		√		
26	AGUS YULIANTO	TK	√		√		
27	CAHYO W.S	TK	√		√		

Keterangan :

1. Penentuan Calon Pekerja dilakukan melalui Musyawarah Desa
2. Penentuan RTM ditetapkan dalam Musyawarah Desa